

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEHUTANAN DI MADAGASKAR:  
STUDI TENTANG NEGARA-PEMERINTAH TRANSISIONAL**

**Toky Lalaina Ratianarivo (2011821004)**  
**Magister Ilmu Hukum,**  
**Hukum Bisnis,**  
**Universitas Parahyangan Katolik,**  
**[Ratianarivo.tokylalaina@yahoo.com](mailto:Ratianarivo.tokylalaina@yahoo.com) atau**  
**[Taranaka.ratianarivo@gmail.com](mailto:Taranaka.ratianarivo@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Kebijakan kehutanan termasuk sebagai norma-norma yang mempunyai kepentingan dalam ekonomi. Aturan dalam kehutanan adalah terpenting juga untuk pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian ini adalah dampak sustainable development dalam masyarakat. Pembangunan sector kehutanan memiliki peran sangat penting dalam perkembangan hukum. Penggunaan analisis hukum dan/atau analisis yuridis memiliki hal diperlukan. Penelitian ini akan membahas tentang analisis yuridis terhadap kebijakan kehutanan di Madagaskar mengenai degradasi kawasan kehutanannya dilihat dari problema dan isunya. Banyak poin akan menjadi relevan diambil sebagai masukkan dalam kebijakan kehutanan optimal. Kebijakan kehutanan di Madagaskar adalah cukup baik dalam strategi dengan struktur kelembagaan dengan organigram orang-orang yang bertanggungjawab serta peraturan UU Kehutanan namun penerapannya atau aplikasinya sangat lemah dikarenakan pertanggungjawab yang resmi atau legal mengantung kecundurian government (gubernmen transisi) yang memiliki konsentrasi lebih kepolitik daripada ekonomi.

**Kata kunci:** Kebijakan Kehutanan; Gubernemen Transisi, Hukum Kehutanan

**ABSTRACT**

Forest policy is included in the important norms for economic life. Those strategy, rule, implementation and effectiveness and force about Forest Policy are important to the national and international economic and social activities. Therefore this is the result of sustainable development into the civil society. The development of the sector of forestry had an important duty to the legal growth. To specify the effect of it will need the legal analysis. These works will examine about the legal analysis about forest policy in Madagascar relating the degradation of its forestry coverage. Some points (strength and weakness) will become relevant as suggestions for an optimal Forest Policy. Define any strength and weakness relating the strategy in use and its implementation and effectiveness. Forest Policy in Madagascar also is relatively enough simple and relatively frameworked (view by its organigram, framework of those stakeholders, and also by its national and international regulation related). Otherwise, its implementation ruin so that it becomes in weak because of the so called legal system which exists in Madagascar (Transitional Government led by kudeta) that focuses more to the politic than the national economic side.

**Keywords:** Forest Policy Transitional Government, Forest Law

## **LATAR BELAKANG**

Kepentingan penulisan dan penelitian ini yang tersebut berbasis dalam perlindungan keadaan dan kawasan kehutan. Karena Kebijakan ini dalam artinya sendiri bermakna salah satu hal atau instrumen diajukan oleh pemerintah atau governemen untuk melindungi fenomena yang mengganggu dan memperoleh perkembangan ekonomi Negara. Salah satu pihak sangat membangunkan ekonomi adalah bidang kehutan. Berarti perlu dijaga dan dilindungi serta penerapan dan/atau aplikasi kebijakan kehutan perlu terdiri, perlu di-up-to-date juga. Dikarenakan Permasalahan juga kehutan saat ini berkembang semakin kompleks, setelah kalau kasus di Negara Republik Madgaskar, hambatan perkembangan hutan berhubungan dengan system transisi.

Tujuan penelitian ini diharapkan oleh penulis supaya dapat memberi referensi untuk mengembangkan Kebijakan Kehutan satu negara ini dan membantu pemahaman hukum kehutanannya melalui menganalisa tentang UUPK. Memberi kontribusi pada pembangunan ilmu hukum yang berkarakter ke-Madagaskaran yang salah satu Negara memakai Civil Law, memiliki nilai yang sama dengan ilmu hukum yang berkembang di vnegara lain Kritik dan amandemen serta pembentukan hukum baru. Untuk itu, penelitian ini bertujuan merumuskan hukum kehutan di Madagaskar mengenai: (1) sisi tinjauan umum ; Struktur Kebijakan Kehutan; (2) hal-hal yang diatur dalam UUK masing-masing dan mencari kelebihan dan kelemahan. (3) penyebab-penyebab yang mengakibatkan kelebihan dan kelemahan terdapat di atas.

Manfaat penelitian ini pertamanya adalah bahwa (1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi yang sifatnya positif perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum kehutan yang menyangkut polisi kehutan dan jaminan ekosistem ; (2) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran yang berharga bagi *legal drafter*, *decision maker*, dan *legal practice* sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, makadapat dirumuskan tiga masalah pokok sebagaiberikut: (1) Bagaimana Kebijakan (di Madagaskar) diterpkan dalam konteks Pengelolaan Hutan di Madagaskar; (2) Faktor-faktor apa (hukum dan non-hukum) mempengaruhi fungsi yang tepat dari polisi hutan Madagaskar? (3) Bagaimana Negara dan Pemerintah Hukum berfungsi dalam Negara Transitional

## **METODE**

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Maka penulisan ini akan menggunakan kepustakaan bermacam-macam terutama dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini dan bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku acuan, majalah, surat kabar, internet, yurisprudensi dan bahan-bahan lain yang menunjang serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas..

### **KERANGKA TEORI**

**Teori-teori transisional.** Teori ini menganggap bahwa kestabilan struktur dan fungsi ternyata tidak selalu membuat organisasi jadi efisien. Organisasi harus memberi perhatian penting pada aspek *human relation*. Bukan untuk kebutuhan pribadi untuk seseorang. Untuk itu iklim komunikasi harus baik. Semakin baik iklim komunikasinya, semakin efisien organisasi tersebut. Baik yang sesuai dengan kemanan lingkungan ekonomi dan bisnis, keamanan lingkungan hidup, kemanan lingkungan atau ekosistem kehutanan, kehidupan masyarakat *under rule of law* (desentralisasi pengelolaan dengan survey tepat- Governemen dan masyarakat semua dibawah otoritas hukum-good governance-governemen pertanggung jawab- perlindungan green revolution- ...) , asas legalitas dan demokratis system pemeritahan hukum. Teori ini menyadari bahwa manusia-manusia di dalam organisasi adalah makhluk yang aktif dan dinamis, bukan sekedar alat produksi yang kaku. Organisasi seharusnya senantiasa mendengarkan aspirasi anggota dan tidak mematikan kreativitas. Hambatan-hambatan komunikasi maupun aliran informasi dalam organisasi yang disebabkan oleh faktor jabatan dan struktur yang kaku harus disingkirkan. Hal ini terlihat ketika zaman Republik ke-3 (sebelum tahun 2009) , kebebasan seorang di Madagscar mulai dilepas. Sentralisasi kekuasaan berubah menjadi desentralisasi. Pengakuan dan penghargaan atas kemajemukan budaya, social dan agama menggantikan paham mayoritas-minoritas. Teori yang tepat mewakili teori transisional ini adalah teori-teori perilaku dan sistem. Teori komunikasi-kewenangan Barnard misalnya, yang menekankan pentingnya mengembangkan dan memelihara suatu system komunikasi. Begitu pula dengan teori hubungan manusiawi Mayo yang menyatakan hubungan kelompok informal lebih penting dan kuat dalam menentukan moral dan produktivitas. Teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang mengikat, tidak seperti yang dipersyaratkan oleh negara, namun karena kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Prof .Mr. H. Krabbe dalam bukunya "Die Lehre Rechtssouvernitat" berpendapat bahwa kesadaran hukum muncul pada setiap individu perasaan itulah cara itu harus hokum. Teoridalam praktek sedikit kesulitan, karena tingkat pengetahuan hukum, setiap orang berbedadan tergantung pada faktor kepentingan dan untuk mencapai. Sebuah contoh yang datang ke permukaan, berapa banyak keputusan Negara Prosiding PTUN, yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama jika partai yang berkuasa dikalahkan. Kenapa?, Karena mereka merasa dirugikan kebijaksanaan. Sangat disayangkan bahwa pihak yang kalah telah menolak untuk menerima kekalahan nya, ada beberapa bagian yang pertanyaan bahan bakar atau mempropokasi, oleh karena itu, keputusan PTUN, tidak dapat dilaksanakan karena perlawanan terhadap putusan M K oleh pihak yang kalah.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hasil penelitian ini adalah bahwa, kebijakan kehutanan belum diganti namun diperbaiki supaya lebih sesuai dengan merumuskan masalah saat ini yang berhubungan dengan keadaan politik di Madagaskar bahwa Madagaskar sekarang hidup dengan situasi atau Negara Transisi ( yang bermaksud transisi ingin menuju ke Republik ke Empat ).

Penerapan atau aplikasi kebijakan pengelolaan di Madagaskar dilemahkan dan diganggu oleh system transisi karena konsentrasi atau focus governemen saat ini lebih ke merumuskan masalah politis disana supaya Madagaskar akan masuk ke Republik ke empat yang digambarkan sebelum sebagai demokrasi, tanpa otoritarsism dan dictactorship. Penerapannya juga diganggu oleh pluralism hukum ( kebanyakan UU Pemerintah dan Lokal sebagai Dina dan UU yang sudah lama masih berlaku dengan yang terbaru ) , karena saat ini juga Madagaskar merubah system kebijakan pengelolaan kehutanan pada desentralasi jika sebelum tahun 2000 ininya disentralisir.

Di Madagascar, dua perangkat pengalihan pengelolaan hutan sekarang hadir di Madagaskar (sesuai dengan asas sustainable development dan desentralisasi governance) : Kontrak GELOSE (*Gestion Locale Securisee* atau Manajemen Aman Lokal) dan kontrak GCF (*Gestion Contractualisee des Forets* atau Manajemen Kontrak Hutan), secara umum, GELOSE dan GCF terutama percobaan untuk mentransfer pengelolaan sumber daya hutan lokal untuk digunakan subsisten serta konservasi. Tujuan dan Prinsip menjadi proses transfer manajemen bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Untuk ini, masyarakat lokal-menggunakan sumber daya alam memiliki kesempatan untuk menegosiasikan kontrak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan seperangkat aturan dengan negara untuk mengelola sumber daya tersebut untuk periode awal dari tiga tahun, diperbaharui setiap sepuluh tahun oleh pada. Hal ini didasarkan pada tiga prinsip dasar: kesukarelaan ditunjukkan oleh permintaan transfer oleh akar rumput, subsidiaritas mencari melengkapi antara para pihak, non-exclusion dengan melibatkan seluruh strata yang berbeda dari tanah yang bersangkutan.

**Faktor blokir Manajemen Transfer pada umumnya** (1) Berbeda pendekatan kepada mitra teknis dan keuangan: organisasi pendukung tidak prosedur homogen meskipun upaya koordinasi nasional. Hal ini sangat disayangkan karena manfaat COBA untuk mendapatkan dukungan yang tidak selalu memenuhi kebutuhan riil mereka. Hal ini menciptakan kepemilikan efektif kesulitan dan berkelanjutan AKIBAT. (2) pengucilan sosial kelompok yang kurang beruntung merupakan sebuah faktor blocking dan konsekuensi dari proses. Pengecualian ini disebabkan implisit oleh struktur sosial lokal yang hampir tidak memungkinkan ekspresi kelompok yang didominasi. Dukungan tidak bisa memecahkan kesulitan ini. (3) konflik internal yang belum terselesaikan disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara COBA dalam Perserikatan mereka merupakan hambatan bagi perkembangan dinamika masyarakat. (4) Kurangnya sumber daya dan sarana dinas kehutanan: Dalam

pandangan para aktor lokal, Dinas Kehutanan adalah wakil utama dari manajemen yang bertanggung jawab dari hutan negara. Visibilitas dukungan dari Dinas Kehutanan merupakan jaminan penting untuk legalisasi hak pengelolaan masyarakat. Namun itu tidak selalu berarti untuk memastikan dukungan dewan dan pemantauan ketat untuk pelaksanaan rencana pembangunan dan untuk mendukung COBA tepat waktu. (5) proses yang lambat dari proses desentralisasi masih lambat meskipun upaya. Secara khusus, keterlambatan dalam evaluasi formal pertama tiga tahun masa percobaan untuk perpanjangan kontrak manajemen mempertanyakan legalitas kuasa COBA. Ini "kabur" situasi merupakan faktor motivasi dan blok pelaksanaan lebih lanjut dari rencana pengelolaan.

### **Kesimpulan**

Kebijakan kehutanan yang saat ini berlaku terlalu sering ditandai dengan orientasi tradisional kehutanan pertahanan dan promosi produksi kayu industri saja. Setiap kali baik dan pribadi yang baik publik menentang, konflik itu diselesaikan dengan larangan atau peraturan. Sering dirancang tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara sektor kehutanan dan aspek lain dari pembangunan, kebijakan ini belum mampu menanggapi perubahan keadaan dan keragaman tumbuh isu yang diangkat oleh kepentingan kehutanan.

Sementara itu, pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya pendekatan baru untuk pembangunan yang melindungi peluang generasi mendatang. Bersamaan, kekayaan dan kompleksitas kontribusi pengembangan sumber daya hutan lebih baik dipahami. Kontribusi ini sering saling melengkapi, tetapi mereka juga bisa saling bertentangan, misalnya antara kepentingan langsung dan finansial dari pemilik hutan dan mereka masyarakat jangka panjang dan non-moneter. Item didukung oleh insentif atau dialog kompensasi harus lebih suka solusi otoriter.

Pengelolaan hutan di Madagaskar telah berkembang selama abad terakhir dari top - down, undang-undang Terpusat Itu Ditujukan untuk membatasi akses ke sumber daya hutan dengan bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Bahwa upaya untuk menempatkan orang-orang lokal di pusat pengambilan keputusan. Altho oleh undang-undang tracing Jelas kecenderungan ini adalah jelas, benar-benar Menerapkan tata kelola Desentralisasi merupakan proses yang kompleks Itu Melibatkan struktur kelembagaan dan dinamika kekuasaan Yang kesulitan untuk memodifikasi. Di Madagaskar, pengaturan tata kelola desentralisasi yang mengubah web interaksi antara aktor: seperti pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat lokal dalam upaya untuk membentuk dinamika kekuasaan. Namun demikian, masih belum jelas dengan luasan Semua yang masyarakat setempat ble untuk menangkap pertukaran tesis peluang dan Pastikan Merupakan Minat mereka yang diwakili. Memahami bagaimana dinamika Berkembang tesis merupakan langkah penting untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan Meningkatkan tesis pada 'em dari waktu ke waktu. Penelitian tambahan diperlukan untuk saling bertukar untuk Penilaian bagaimana tesis kelembagaan prinsip-prinsip good governance Mempengaruhi:

seperti partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

### Saran

Atas dasar analisis dan kesimpulan di atas maka beberapa saran yang menjadi hal penting. Ada berbagai rekomendasi yang dapat diajukan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, sistem kebijakan kehutanan yang optimal adalah:

1. Kebijakan Kehutanan diperlukan sesuai dengan tatanan ekonomi dan financial Negara;
2. Kebijakan Kehutanan diperlukan sesuai dengan urutan hirarkis hukum dan Konstitusi dan treaty (KTT dengan prinsip-prinsipnya); dan juga perlu sesuai dengan good governance (sesuai dengan tiga elemen diurut oleh Francis Fukuyama<sup>1</sup> bahwa :the state-rule of law-accountability : kecukupan monitoring )
3. Hukum Kehutanan diperlukan sesuai dengan visi politik Pemerintah Legal;
4. Kebijakan Kehutanan diperlukan sesuai dengan tradisi masyarakat

### DAFTAR PUSTAKA

#### Referensi

Pierre Montagne et Bruno Ramamonjisoa

“Politiques forestières à Madagascar entre repression et autonomie des acteurs”(Forest policies in Madagascar between repression and actor's autonomy), 294-295 | July-October 2006: Madagascar: La gestion durable de l'environnement, Dossier : La gestion durable de l'environnement à Madagascar

Declaration of Environmental Policy in Madagascar, By the Ministry of Environment and Forest, January 2010, REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA: Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana

A Comparative Study of Forestry in Finland, Norway, Sweden, and the United States, with Special Emphasis on Policy Measures for Nonindustrial Private Forests in Norway and the United States, Berit Hauger Lindstad

Forest Management in Madagascar: An Historical Overview Daniela Raik Human Dimensions Research Unit, Cornell University, Fernow Hall, Ithaca, NY 14850, USA, E-mail: dbr23@cornell.edu, madagascar conservation & development volume 2 | issue 1 — december 2007



# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

“Challenges of forest governance in Madagascar”, William J McConnell and Sean P Sweeney, *Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change, Indiana University, 408 North Indiana Avenue, Bloomington, IN 47408-3799, USA The Geographical Journal* , Vol.171 , No. 2, June 2005, pp. 223–238, E-mail: [wjmconn@indiana.edu](mailto:wjmconn@indiana.edu),

“Comparative Analysis of Forest Laws in Twelve Sub-Saharan African Countries”, By Volker Kohler & Franz Schmithusen, Fao Legal Papers online, July 2004

“Madagascar Draft R-PP: Initial comments by the TAP “ March 22-25, 2010, FCPF Technical Advisory Panel, FCPF Participants Committee, La Lope, Gabon For TAP review team Madagascar: Jürgen Blaser

“Organigram of the Ministry of Environment and Forestry”, By Mr President Marc Ravalomanana, SAGE (Service d’Appui a la Gestion de l’Environnement), Fampandrosoana Maharitra, Last update: (17-06-2008)

“Voices from Madagascar’s Forests”, Improving Representation and Rights of Malagasy Forest Peoples, *A Conference held on the 5th & 6th June 2010 at the School of International Development, University of East Anglia, Norwich, UK*, and Final Report September 2010

“Reforma tenure atas sumberdaya hutan”, Konsep FAO dan Kemungkinan Pelaksanaannya di Indonesia, Iman Santoso Koordinator Pengurus WG Tenure, info kebijakan, Working Group on Forest Land Tenure [www.wg-tenure.org](http://www.wg-tenure.org) - Warta Tenure Nomor 8 - Juli 2010

“Evaluation des ressources forestières mondiales 2010, rapport national madagascar” Département des forêts, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, fra 2010/121, rome, 2010

Departemen Kehutanan. 2002. Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta.

Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Zain, AS. 1997. Aspek Pembinaan kawasan Hutan dan stratifikasi Hutan Rakyat. Penerbit Rineka cipta. Jakarta.

Ministry of environment and forest, “donnees et statistiques environnementales de Madagascar”, Evolution de la couverture forestière, Evolution des surfaces incendiées, Evolution des surfaces reboisées, Evolution des aires protégées, Evolution des Permis Environnementaux delivres, Suivi de la gestion des plaints environnementales, *MEF/SG/DGE/DIDE Edition Novembre 2009*

# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

Decret N°98-782, relatif au régime de l'exploitation forestière

Ministère de l'environnement, des eaux, des forêts et du tourisme, DÉCRET N° 2008-600 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-607 du 10 septembre 1995 portant création de l'Office National pour l'Environnement

Constitution of the Republic of Madagascar, Extrait de l'Arrêt n° 01-HCC/AR du 27 avril 2007, (*J.O. n° 3104 du 3 mai 2007, pages 2897-2923*)

Direction Générale de l'Environnement et des Forêts. 2008. National Wildlife Trade Policy Review, Madagascar, UNEP/CITES, 80 pp.

Federal Ministry of Consumer Protection Food and Agriculture (BMVEL). 2002. Biological Diversity in Agriculture, Forestry and Fisheries., Bonn.

Jones, J.P., 2004. The sustainability of crayfish harvesting in Ranomafana National Park, Madagascar. PhD Thesis.

Rabetaliana H. et al, 2003. Dynamiques des forêts naturelles de montagne à Madagascar. Secrétaire Permanent Flore, 2009. Base de données. Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, 1998. Textes et annexes, Convention sur la Diversité Biologique.

Decree 2010-141 prohibiting the logging, exploitation and exportation of rosewood and ebony was finally signed on 24 March 2010 while it was communicated to all environmental technical and financial partners only on 25 April.

Republikan'i Madagasikara, 2006. Madagascar Action Plan.

Secrétaire Permanent Flore, 2009. Data Bases

Fourth National Report on Biological Diversity Convention Madagascar, MEF, UN Conference on Environment and Development followed by Declaration of Rio de Janeiro, on year 1992

“Community - based management in two biosphere reserves in Madagascar – distinctions and similarities: What can be learned from different approaches? “, Madagascar conservation & development volume 4 | issue 2 — December 2009, Nadine V. M. Fritz - Viettai, Christian Röttger and Susann Stoll-Kleemann

F. Fukuyama / *Journal of Democratic Theory* 1, 4 (2011) 83-92, Book Review: Francis Fukuyama, \* *The Origins of Political Order*, Volume 1 (New York: Farrar, Strauss, and Giroux, 2011), 585 pages. ISBN: 978-0-374-22734-0.



# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

14th international planning history society conference assessing the sustainability of urban ecosystems: an innovative approach didem dizdaroglu & tan yigitcanlar & les Dawes

Pas de convention sur les forêts, mais 10 traités sur les arbres *B.M.G.S. Ruis*  
*Barbara M.G.S. Ruis* est chercheur en droit international relatif aux forêts, à la Faculté de droit de l'Université Vrije, à Amsterdam (Pays-Bas).

Sibree, J. 1896. *Madagascar before the Conquest: The Island, the Country, and the People*. T. Fisher Unwin, London.

The World Bank. 2007. *Madagascar Data Profile*. The World Bank 2007 [cited January 4 2007]. Available from <http://devdata.worldbank.org/external/CPPProfile.asp?CCODE+MDG&PTYPE=CP>.

Tyson, P. 2000. *Island of dreams*. In: *The Eighth Continent: Life, Death, and Discovery in the Lost World of Madagascar*. HarperCollins, New York.

UNDP, UNEP, World Bank, and World Resources Institute. 2000. *World Resources 2000-2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of Life*. In: *World Resources Series*. United Nations, Washington, DC.

Rajaonson, B., Randriamarolaza, L. P., Randrianaivo, D., Ratsimbazafy, E., Rejo Tsiresy, V. and Bertrand, A. 1995. *Elaboration d'une politique et d'une strategie de gestion des feux de vegetation a Madagascar*. Office National de l'Environnement, Antananarivo.

Randrianasolo, J. 2000. *Capitalisation des Experiences en Gestions Contractualisées de Forêts à Madagascar: Fichiers d'Experiences*. Intercooperation Suisse, Antananarivo.

Ratovoson, C. 1979. *Les problèmes du tavy sur la côte est Malagache*. *Madagascar Review de Géographie* 35, 148.

Scott, J. C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University, New Haven.

Sibree, J. 1881. *The Antananarivo Annual and Madagascar Magazine*. London Missionary Society Press, Antananarivo.

Antona, M., Bienabe, E. M., Salles, J., Pechard, G., Aubert, S., and Ratsimbarison, R. 2004. *Rights transfers in Madagascar biodiversity policies: achievements and significance*. *Environment and Development Economics* 9: 825-847.

# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

Bertrand, A. 1994. *Revue documentaire prealable a l'elaboration d'une politique et d'une strategie de gestion des feux de vegetation a Madagascar*. CIRAD November.

Bertrand, A., and Razafindrabe, M. 1997. *Lever l'insécurité foncière: une des premières clefs du développement de Madagascar*. Paper read at Colloque International Politiques des Structures et Action Foncière, 24-26 November, at La Réunion.

Brechin, S. R., West, P. C., Harmon, D., and Kutay, K. 1991. *Resident peoples and protected areas: a framework for inquiry*. In: Resident peoples and national parks: social dilemmas and strategies in international conservation, P. C. West and S. R. Brechin (eds.), pp 5-28. University of Arizona, Tuscon.

Brechin, S. R., Wilshusen, P. R., Fortwangler, C. L. and West, P. C. 2002. *Beyond the square wheel: Toward a more comprehensive understanding of biodiversity conservation as social and political process*. Society & Natural Resources 15, 1: 41-64.

Chambers, R. 1997. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology, London.

Conservation International, IRG, Ministere de l'Environnement des Eaux et Forets, and USAID. 2007. *Change in Natural Forest Cover Madagascar 1990-2000-2005*. Conservation International, Washington, DC.

Donohoe, M. 2003. *Causes and health consequences of environmental degradation and social injustice*. Social Science & Medicine 56, 2003: 573-587.

Dufils, J. M. 2003. *Remaining forest cover*. In: The Natural History of Madagascar, S. M. Goodman and J. P. Benstead (eds.), pp 88-96. University of Chicago, Chicago.

Durbin, J. C., and Ralambo, J. A. 1994. *The role of local people in the successful maintenance of protected areas in Madagascar*. Environmental Conservation 21, 2: 115-120.

Erdmann, T. K. 2003. *The dilemma of reducing shifting cultivation*. In: The Natural History of Madagascar, S. M. Goodman and J. P. Benstead (eds.), pp 134-139. University of Chicago Press, Chicago.

Ganzhorn, J. U., Langrand, O., Wright, P. C., O'Connor, S., Rakotosamimanana, B., Feistner, A. T. C. and Rumpler, Y. 1997. *The state of lemur conservation in Madagascar*. Primate Conservation 17: 70-86.

Goodman, S. M., and Benstead, J. P. (eds.). 2003. *The Natural History of Madagascar*. University of Chicago, Chicago.

# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

Green, G. M., and Sussman, R. W. 1990. *Deforestation history of the eastern rain forests of Madagascar from satellite images*. Science 248, 4952: 212-215.

Henkels, D. 2001. *A close up of Malagasy environmental law*. Vermont Journal of Environmental Law 3: 1-16.

Jarosz, L. 1993. *Defining and explaining tropical deforestation: Shifting cultivation and population growth in colonial Madagascar (1896-1940)*. Economic Geography 69, 4: 366-379.

Klein, J. 2002. *Deforestation in the Madagascar Highlands – Established ,truth‘ and scientific uncertainty*. GeoJournal 56: 191-199.

Kull, C. A. 2000. *Deforestation, erosion, and fire: Degradation myths in the environmental history of Madagascar*. Environment and History 6: 423-450.

Kull, C.A. 2002. *Empowering pyromaniacs in Madagascar: Ideology and legitimacy in community-based natural resource management*.

Development and Change 33, 1: 57-78. Maldié, C. 2000. Note de lecture des quatre rapports d'évaluation externe du PAE. ONE - SCAC, Antananarivo.

Marcus, R. R. 2000. *Cultivating Democracy on Fragile Grounds: Environmental Institutions and Non-Elite Perceptions of Democracy in Madagascar and Uganda*. Unpubl. Ph.D. thesis, University of Florida.

Montagne, P. 2004. *Analyse rétrospective du transfert de gestion à Madagascar et aperçu comparatif des axes méthodologiques des transferts de gestion sous loi 96-025 et sous décret 2001-122*. Consortium RESOLVE - PCP - IRD, Antananarivo.

Moser, C. M. 2006. *A selection correction for cloud cover in satellite images in an analysis of deforestation in Madagascar*. In: Working Paper: University of Western Michigan.

Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A. B. and Kent, J. 2000. *Biodiversity hotspots for conservation priorities*. Nature 403: 853-858.

Nelson, R., and Horning, N. 1993. *AVHRR-LAC estimates of forest area in Madagascar, 1990*. International Journal of Remote Sensing 14: 1463- 1475.

Peet, R., and Hartwick, E. 1999. *Theories of Development*. The Guilford Press, New York.



# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

Peters, J. 1998. *Transforming the integrated conservation and development project (ICDP) approach: Observations from the Ranomafana National/ Park Project, Madagascar*. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 11: 17-47.

Fahrig L (2003) Effects of habitat fragmentation on biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 34: 487–515. doi: [10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419](https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419).

Watson JEM, Whittaker RJ, Dawson TP (2004) Habitat structure and proximity to forest edge affect the abundance and distribution of forest-dependent birds in tropical coastal forests of southeastern Madagascar. *Biological Conservation* 120: 311–327. doi: [10.1016/j.biocon.2004.03.004](https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.03.004). Acemoglu, D. and J. Robinson (2006), *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*, Cambridge University Press, New York.

Afrobarometer (2005), *La Démocratie à Madagascar: un Soutien Marqué Mais un Fonctionnement à Améliorer*, Briefing Paper No. 23.

Agrawal, A. and J. C. Ribot (1999), “Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and African Cases”, *Journal of Developing Areas*, Vol. 33, pp. 473–502.

Alba, E. M. (2009), “Extractive Industries Value Chain. A Comprehensive Integrated Approach to Developing Extractive Industries”, World Bank Working Paper, The World Bank, Washington D.C.

Alphonse, M. (2004), Article sur l’Exportation Illicite de Bois de Rose : Rolly Mercia, Convoqué à la Gendarmerie. *Madagascar Tribune*, 9 July 2004.

Alphonse, M. (2007), Exportation Illicite de Bois de Rose, *Madagascar Tribune* N° 5472, 29 January 2007.

Andrews, M. (2009), *Isomorphism and the Limits to African Public Financial Management Reform*, Faculty Research Working Paper Series, Kennedy School of Government, Harvard University.

Andriambelomiandana, R. (1992), *Liberalisme et Developpement à Madagascar*, Foi et Justice, Antananarivo.

Aubert, S., S. Razafiarison and A. Bertrand (eds.) (2008), *Deforestation et Systemes Agraires a Madagascar, Les dynamiques des Tay sur la Cote Orientale*, Cirad, Antananarivo.

# E-Journal Graduate Unpar

## Part B – Legal Science

Vol. 1, No. 1 (2014)

---

Ballet, J. and N. Ragafa, N. (2009), “Impact Economique des Arretes Autorisant les Exportations de Bois Precieux a Madagascar”, Unpublished report to PGM-E/GTZ.

Barma, N., K. Kaiser and T. M. Le (2009), The Political Economy of the Natural Resource Paradox. Governing Extractive Industries for Sustainable Development. Preliminary Outline, unpublished draft document, The World Bank, Washington D.C.

Bates, R. H. (2010), *Prosperity and Violence. The Political Economy of Development*, W. W. Norton and Company, New York.

Bertrand, A., N. Rabesahala Horning and P. Montagne (2009), Gestion Communautaire ou Preservation des Ressources Renouvelables, Histoire Inachevée d'une Evolution Majeure de la politique Environnementale à Madagascar, VertigO. La Revue en Sciences de l'Environnement, Vol. 9, No. 3.

Boone, C. (2007), “Africa's New Territorial Politics: Regionalism and the Open Economy in Côte d'Ivoire”, *African Studies Review*, Vol. 50, Nr. 1, pp. 59-81.

